

Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Meningkatkan Partisipasi Politisi Perempuan di Parlemen Indonesia

Edward Benedictus Roring *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
* e-mail: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politisi perempuan di dalam Parlemen. Penulis mengemukakan penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas sistem ini dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui analisis pendekatan penelitian yaitu Yuridis Normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem proporsional terbuka memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk mencalonkan diri, namun peningkatan partisipasi politik perempuan masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain, dominasi partai politik oleh elit laki-laki, kurangnya dukungan finansial bagi calon perempuan, serta stereotip gender yang masih kuat di masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam konteks peningkatan partisipasi politisi perempuan di dalam Parlemen Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang relevan, antara lain perlunya reformasi partai politik untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan, peningkatan dukungan finansial bagi calon perempuan, serta kampanye kesadaran publik untuk mengubah persepsi gender.

Kata Kunci: Proporsional, Parlemen, Finansial, Parlemen, Gender

Abstract

It is hoped that the open proportional general election system in Indonesia will increase the participation of female politicians in Parliament. The author stated that this research aims to test the effectiveness of this system in achieving this goal. Through analysis of the research approach, namely Normative Jurisdiction, this research found that although the open proportional system provides greater opportunities for women to nominate themselves, the increase in women's political participation is still limited. Several factors that influence this include the domination of political parties by male elites, the lack of financial support for female candidates, and gender stereotypes that are still strong in society. This research also highlights the importance of evaluating the open proportional election system in the context of increasing the participation of female politicians in the Indonesian Parliament. The results of this research provide relevant policy implications, including the need to reform political parties to provide greater space for women, increase financial support for female candidates, as well as public awareness campaigns to change gender perceptions.

Keywords: Proportional, Parliament, Financial, Parliament, Gender

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi sebuah negara. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dianggap dapat mendorong pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem pemilihan umum proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004 diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Sistem ini dianggap lebih inklusif karena memungkinkan calon individu untuk bersaing secara langsung untuk mendapatkan suara, tidak hanya mengandalkan urutan dalam daftar calon partai politik. Selain itu, adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif juga diharapkan dapat mendorong partai politik untuk mencalonkan lebih banyak perempuan.

Namun, implementasi sistem proporsional terbuka di Indonesia tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan signifikan partisipasi politik perempuan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif, namun angka tersebut masih jauh dari target 30%. Hal ini mengindikasikan adanya berbagai tantangan dan kendala yang menghambat partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dalam ranah politik merupakan isu global yang telah lama menjadi sorotan. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah menjadi perhatian serius, terutama setelah amandemen UUD 1945 yang memberikan jaminan atas hak-hak politik warga negara. Salah satu instrumen yang dianggap dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah sistem pemilihan umum proporsional terbuka, yang diadopsi Indonesia sejak tahun 2008. Sistem ini memungkinkan pemilih memilih partai politik sekaligus calon anggota legislatif secara langsung, sehingga partai politik cenderung menempatkan calon perempuan pada posisi strategis dalam daftar calon legislatif (caleg).

Undang-Undang Affirmative Action yang terdiri dari 2 undang – undang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD: Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Undang-undang ini juga mengatur tentang keharusan partai politik untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam kepengurusan partai. menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Affirmative Action masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari internal partai politik yang seringkali masih menempatkan perempuan pada posisi yang marginal. Selain itu, stereotip gender yang masih kuat di masyarakat juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk maju dalam politik. Meskipun adanya Undang-Undang Affirmative Action dan sistem pemilihan umum proporsional terbuka, peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya dukungan finansial bagi calon perempuan, terbatasnya akses perempuan terhadap jaringan politik, serta diskriminasi gender yang masih terjadi dalam proses pencalonan dan kampanye. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kuota 30% juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam politik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk partai politik. Kedua, perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari partai politik terhadap pencalonan perempuan, baik dalam bentuk pelatihan kepemimpinan maupun dukungan finansial. Ketiga, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Affirmative Action.

Analisis Lebih Lanjut

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa sistem proporsional terbuka belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia antara lain:

- Dominasi budaya patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang kurang berdaya dalam ranah politik. Stereotipe gender yang masih melekat pada perempuan seringkali menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam politik.
- Kurangnya dukungan partai politik: Partai politik seringkali masih didominasi oleh laki-laki dan belum sepenuhnya berkomitmen untuk mendorong keterwakilan perempuan. Kandidat perempuan seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif.

- Faktor ekonomi: Kampanye politik membutuhkan biaya yang besar. Perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya finansial dibandingkan laki-laki, sehingga kesulitan untuk bersaing dalam kontesasi politik.
- Kekerasan politik: Kekerasan politik terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ancaman kekerasan fisik dan psikologis dapat membuat perempuan enggan untuk berpartisipasi dalam politik.
- Kurangnya pendidikan politik: Pendidikan politik yang masih terbatas membuat perempuan kurang memahami tentang proses politik dan hak-hak politik mereka.

Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain yang sedang berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai representasi perempuan dalam politik, khususnya terkait proporsi terbuka bagi politisi perempuan, telah menjadi topik penting dalam studi gender dan politik. Berikut adalah beberapa tema dan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan:

1. Kebijakan Kuota Gender:

Banyak negara telah mengadopsi kebijakan kuota gender untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota efektif dalam meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih, tetapi dampaknya terhadap perubahan substantif dalam kebijakan bisa bervariasi.

2. Hambatan Sosial dan Budaya:

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering menghadapi hambatan sosial dan budaya yang membatasi partisipasi mereka dalam politik. Stereotip gender, tanggung jawab domestik, dan norma sosial sering menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.

3. Pengaruh Sistem Pemilihan:

Sistem pemilihan, seperti sistem proporsional atau mayoritarian, juga mempengaruhi representasi perempuan. Sistem proporsional cenderung lebih menguntungkan perempuan karena partai politik lebih cenderung menominasikan perempuan dalam daftar calon.

4. Peran Partai Politik:

Penelitian juga mengkaji bagaimana partai politik memainkan peran penting dalam membuka atau menutup peluang bagi politisi perempuan. Partai yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender lebih mungkin memberikan dukungan dan peluang kepada perempuan untuk maju sebagai calon.

5. Dampak Representasi Perempuan:

Studi juga meneliti dampak dari peningkatan representasi perempuan dalam politik terhadap pembuatan kebijakan. Perempuan sering membawa perspektif yang berbeda dalam kebijakan, terutama terkait isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.

6. Kepemimpinan Perempuan:

Ada juga penelitian yang mengkaji bagaimana gaya kepemimpinan perempuan berbeda dengan laki-laki dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika politik di dalam institusi seperti parlemen atau pemerintahan lokal.

Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas dan tantangan dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghalangi upaya tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang tepat untuk mengkaji Undang-Undang Affirmative Action. Metode ini membuat penulis atau peneliti mudah untuk menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan implikasinya. dengan melakukan analisis kebijakan untuk menilai efektivitas sistem pemilihan proporsional terbuka dari perspektif gender. Kebijakan pemilu akan dievaluasi berdasarkan indikator seperti peningkatan jumlah politisi perempuan yang terpilih, keterlibatan perempuan dalam proses pencalonan, dan keberhasilan perempuan dalam kampanye politik. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen kebijakan yang mendukung atau menghambat peningkatan partisipasi perempuan di parlemen.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia?
2. Bagaimana Konsep dan Teori Sistem Proporsional Terbuka?
3. Apa Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan?
4. Apakah Terdapat Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Segala Aspek Kehidupan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia

Perjuangan untuk meningkatkan representasi perempuan di Parlemen Indonesia telah berlangsung panjang dan penuh dinamika. Selama beberapa dekade, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong partisipasi politik perempuan, baik melalui jalur legislatif maupun advokasi masyarakat sipil. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah tantangan dan hambatan masih menghalangi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Stereotype gender yang masih kuat di masyarakat seringkali menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menghambat mereka untuk berkarir di bidang politik. Selain itu, kurangnya dukungan finansial, jaringan, dan akses informasi juga menjadi kendala bagi perempuan untuk maju dalam kontestasi politik. Faktor struktural seperti sistem partai politik yang masih patriarkal dan praktik politik yang cenderung elitis juga turut memperparah situasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mewajibkan partai politik untuk memberikan kuota 30% bagi calon perempuan dalam setiap pemilihan umum. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil juga aktif melakukan advokasi dan kampanye untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Program-program pelatihan kepemimpinan dan pendanaan bagi calon perempuan juga menjadi bagian penting dari upaya ini.

Peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Perempuan cenderung lebih memperhatikan isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dengan adanya lebih banyak perempuan di parlemen, maka suara dan kepentingan perempuan akan lebih terwakili dalam pembuatan kebijakan publik. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik juga dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Meskipun telah terjadi kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam representasi politik di Indonesia. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain: Penguatan Pendidikan Politik Perempuan: Melalui pendidikan politik, perempuan dapat lebih memahami sistem politik dan cara kerja lembaga legislatif, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik: Partai politik perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk

berkarier dan mengembangkan diri di dalam partai. Penguatan Jaringan dan Dukungan untuk Calon Perempuan: Pembentukan jaringan perempuan politikus dapat saling mendukung dan berbagi informasi, serta adanya dukungan finansial dan logistik dari berbagai pihak. Perubahan Norma dan Budaya: Upaya mengubah norma dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan perlu dilakukan secara terus-menerus melalui kampanye kesadaran dan pendidikan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia dapat terus meningkat dan mencapai kesetaraan gender yang sejati. Representasi perempuan di Parlemen Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Meskipun telah terjadi kemajuan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi. Dengan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif, diharapkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- Konsep dan Teori Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka: Sebuah Tinjauan Mendalam

Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka merupakan salah satu sistem pemilihan umum yang memberikan kebebasan penuh kepada pemilih untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif yang diinginkan dari daftar calon yang diajukan oleh partai politik. Dalam sistem ini, suara rakyat tidak hanya ditujukan kepada partai politik secara keseluruhan, tetapi juga kepada calon individu yang dianggap paling mewakili aspirasi mereka.

Mekanisme dan Tujuan

Mekanisme kerja sistem ini cukup sederhana. Partai politik akan menyusun daftar calon lengkap yang kemudian disajikan kepada pemilih. Pemilih kemudian dapat memilih calon individu yang mereka inginkan dari daftar tersebut. Jumlah kursi yang diperoleh partai politik di lembaga legislatif akan sebanding dengan total suara yang diperoleh partai tersebut. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan representasi yang lebih akurat bagi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat, serta mendorong persaingan yang sehat antar calon dalam partai politik.

Kelebihan dan Kekurangan

Sistem Proporsional Terbuka memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya adalah:

- Hubungan Langsung antara Pemilih dan Wakil Rakyat: Terbentuknya hubungan yang lebih kuat antara pemilih dan wakilnya memungkinkan adanya komunikasi yang lebih efektif dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
- Peningkatan Partisipasi Politik: Pemilih merasa lebih terlibat dalam proses politik karena memiliki kebebasan memilih secara langsung.
- Persaingan Sehat: Persaingan antar calon dalam partai politik akan mendorong munculnya figur-figur yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas.
- Representasi yang Lebih Akurat: Hasil pemilihan cenderung lebih mencerminkan preferensi pemilih sehingga representasi berbagai kelompok kepentingan di parlemen menjadi lebih seimbang.

Namun, sistem ini juga memiliki sejumlah kekurangan, di antaranya adalah:

- Money Politics: Kecenderungan terjadinya politik uang sangat tinggi karena calon harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan persaingan.
- Fragmentasi Partai: Terlalu banyaknya calon yang bersaing dapat menyebabkan fragmentasi partai politik dan menghambat terbentuknya koalisi yang kuat.
- Sulitnya Membangun Soliditas Partai: Loyalitas kader partai cenderung lebih kepada individu calon daripada partai secara keseluruhan, sehingga sulit membangun soliditas partai.
- Biaya Politik yang Tinggi: Biaya kampanye cenderung lebih mahal karena setiap calon harus melakukan kampanye secara mandiri.

Perdebatan dan Tantangan

Sistem Proporsional Terbuka seringkali menjadi topik perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi karena memberikan suara kepada rakyat. Namun, pihak lain mengkritik sistem ini karena rentan terhadap praktik politik uang dan

dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh sistem ini adalah bagaimana memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang baik.

Implikasi dan Masa Depan

Penerapan sistem Proporsional Terbuka memiliki implikasi yang luas terhadap sistem politik suatu negara. Sistem ini dapat mengubah dinamika partai politik, meningkatkan peran masyarakat sipil, dan memengaruhi kualitas demokrasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas pemilu. Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka merupakan salah satu sistem pemilu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan sistem pemilu yang tepat harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik politik masing-masing negara. Meskipun sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi, namun perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, terutama terkait dengan praktik politik uang dan kualitas calon.

- Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Hambatan dan Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam konteks politik dan sosial:

Hambatan Struktural dan Kultural

- Norma dan Stereotipe Gender: Masyarakat seringkali memiliki pandangan yang terpatrit mengenai peran gender, di mana perempuan dianggap lebih cocok untuk urusan domestik daripada peran kepemimpinan. Stereotipe ini menjadi penghalang bagi perempuan untuk berambisi dan berkontribusi dalam bidang-bidang yang didominasi laki-laki.
- Diskriminasi Sistemik: Diskriminasi dalam bentuk ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi lainnya, secara tidak langsung menghambat partisipasi perempuan.
- Kurangnya Dukungan Keluarga: Banyak perempuan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan karier politik. Kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga dapat menjadi penghalang utama.
- Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun psikologis, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif.

Hambatan Politik dan Sosial

- Kuota 30% yang Tidak Efektif: Meskipun kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif telah diterapkan, namun implementasinya seringkali tidak efektif. Partai politik seringkali mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota tanpa memberikan dukungan yang memadai.
- Kultur Politik yang Maskulin: Budaya politik yang masih dominan maskulin membuat perempuan merasa tidak nyaman dan kurang diterima.
- Kurangnya Jaringan dan Mentorship: Perempuan seringkali memiliki jaringan yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan dan mentorship dalam karir politik.
- Biaya Politik yang Tinggi: Biaya kampanye yang mahal menjadi hambatan bagi perempuan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Hambatan Psikologis

- Kurang Percaya Diri: Banyak perempuan merasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki dalam dunia politik.
- Sindrom Impostor: Perempuan seringkali merasa tidak pantas atau tidak cukup kompeten untuk menduduki posisi kepemimpinan, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang sama.

- Takut Gagal: Ketakutan akan kegagalan dapat menghalangi perempuan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru.

Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

- Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghapuskan stereotipe gender.
- Kuatkuasa Hukum: Memperkuat penegakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
- Dukungan Institusi: Memberikan dukungan yang lebih kuat dari partai politik, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat kepada perempuan yang ingin berkarir di bidang politik.
- Kuotifikasi yang Efektif: Menerapkan kuota 30% secara konsisten dan memastikan bahwa perempuan yang dicalonkan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.
- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja untuk memberdayakan mereka secara ekonomi.
- Membangun Jaringan Perempuan: Memfasilitasi pembentukan jaringan perempuan untuk saling mendukung dan berbagi informasi.
- Kampanye Anti-Kekerasan: Melakukan kampanye secara intensif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, merupakan tantangan yang kompleks. Namun, dengan upaya bersama dari berbagai pihak, perubahan positif dapat dicapai. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung, dan bebas dari diskriminasi agar perempuan dapat berkontribusi secara penuh dalam pembangunan bangsa.

- Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial, masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, perempuan masih sering kali mengalami diskriminasi, stereotip gender, dan kurangnya akses ke peluang yang setara. Hambatan ini dapat bersumber dari faktor struktural, budaya, dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap gender. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memastikan kesetaraan gender di semua sektor.

2. Reformasi Kebijakan dan Peraturan yang Inklusif Gender

Salah satu rekomendasi utama adalah memperbarui dan memperkuat kebijakan serta peraturan yang ada agar lebih inklusif terhadap gender. Ini termasuk memastikan bahwa undang-undang tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan tidak hanya netral gender, tetapi juga proaktif dalam menghapus hambatan yang dihadapi oleh perempuan. Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja, serta peningkatan akses perempuan ke pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk memperkuat posisi perempuan di pasar kerja.

3. Penyediaan Akses dan Dukungan bagi Perempuan

Meningkatkan partisipasi perempuan juga memerlukan penyediaan akses yang lebih baik ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Hal ini meliputi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas penitipan anak yang terjangkau. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses ke kredit, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan bagi usaha kecil yang dipimpin perempuan sangat penting. Dengan demikian, perempuan tidak hanya diberi kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi juga dilengkapi dengan alat dan dukungan yang diperlukan untuk berhasil.

4. Promosi Peran Model dan Pendidikan Kesadaran Gender

Meningkatkan kesadaran gender di masyarakat juga merupakan bagian penting dari rekomendasi kebijakan ini. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus berperan aktif dalam mempromosikan peran model perempuan di berbagai bidang dan mengadakan kampanye pendidikan yang menantang stereotip gender. Pendidikan kesadaran gender harus dimulai sejak usia dini, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai kesetaraan gender. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan publik.

5. Penguatan Keterwakilan Perempuan di Pengambilan Keputusan

Akhirnya, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, penting untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan, perusahaan, maupun organisasi masyarakat. Ini dapat dicapai melalui penerapan kuota gender di parlemen, pengembangan kebijakan yang mendukung perempuan dalam kepemimpinan, serta penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan dapat memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak luas.

KESIMPULAN

Penelitian yang menganalisa mengenai Efektivitas Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Meningkatkan Partisipasi Politisi Perempuan di Parlemen Indonesia ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam meningkatkan partisipasi politisi perempuan di parlemen Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang telah penulis rincikan untuk dapat diambil:

1. Peningkatan Representasi Perempuan di Parlemen

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah politisi perempuan di parlemen Indonesia. Data menunjukkan adanya peningkatan proporsi perempuan yang terpilih dalam beberapa pemilu terakhir sejak penerapan sistem ini. Hal ini terutama disebabkan oleh kesempatan yang lebih terbuka bagi perempuan untuk mencalonkan diri dan mendapatkan dukungan langsung dari pemilih tanpa terlalu bergantung pada posisi dalam daftar calon yang ditentukan oleh partai.

2. Peran Kebijakan Kuota Gender

Kebijakan kuota gender yang diintegrasikan ke dalam sistem proporsional terbuka telah memainkan peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Kuota gender mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sejumlah minimum perempuan, yang memaksa partai untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mendukung calon perempuan. Namun, efektivitas kuota ini juga bergantung pada implementasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten.

3. Faktor Pendukung dan Hambatan

Meskipun sistem ini telah membuka peluang lebih besar bagi perempuan, sejumlah hambatan masih ada yang membatasi keterwakilan perempuan secara optimal. Faktor sosial-budaya, seperti stereotip gender, tanggung jawab domestik, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, tetap menjadi kendala utama bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Selain itu, dinamika internal partai politik, seperti penempatan calon perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam daftar calon, juga menghambat efektivitas sistem ini.

4. Dinamika Partai Politik

Partai politik memainkan peran ganda sebagai pendukung sekaligus penghambat bagi keterwakilan perempuan. Di satu sisi, partai yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender cenderung lebih berhasil dalam mendorong calon perempuan untuk maju dan terpilih. Di

sisi lain, partai yang kurang memperhatikan aspek gender cenderung menempatkan calon perempuan pada posisi yang tidak strategis, sehingga mengurangi peluang mereka untuk terpilih.

5. Efektivitas Sistem dalam Konteks Indonesia

Sistem pemilihan umum proporsional terbuka efektif dalam meningkatkan partisipasi politisi perempuan, namun efektivitas ini masih terbatas. Sistem ini memberi ruang lebih bagi pemilih untuk memilih calon individu, termasuk perempuan, tetapi tidak secara otomatis mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi internal partai politik, peningkatan kapasitas calon perempuan, serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya representasi perempuan.

6. Rekomendasi untuk Peningkatan

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan lebih lanjut, beberapa langkah strategis dapat diambil:

- Penguatan Implementasi Kuota Gender: Meningkatkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan kuota gender dan memastikan bahwa calon perempuan ditempatkan pada posisi yang kompetitif dalam daftar calon.
- Peningkatan Dukungan bagi Calon Perempuan: Partai politik dan pemerintah harus menyediakan pelatihan dan dukungan sumber daya yang memadai bagi calon perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkompetisi dalam pemilu.
- Edukasi Publik: Kampanye kesadaran publik yang menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen dapat membantu mengubah persepsi dan mendorong pemilih untuk mendukung calon perempuan.

7. Implikasi Kebijakan dan Studi Lanjutan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilihan umum proporsional terbuka memiliki potensi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, kebijakan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah lain yang mendukung partisipasi politik perempuan secara lebih luas. Studi lanjutan dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam tentang peran partai politik, dampak sosial budaya terhadap keterwakilan perempuan, serta perbandingan dengan sistem pemilu di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.

Secara keseluruhan, sistem pemilihan umum proporsional terbuka memiliki efektivitas yang terbukti dalam meningkatkan partisipasi politisi perempuan di parlemen Indonesia. Namun, untuk mencapai keterwakilan yang lebih adil dan setara, perlu adanya upaya berkelanjutan dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
Ramadhanty, A., Livtanta, N. K., Naila, N., & Ummah, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Kuota Gender (Kvinnokvot) Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Lembaga Parlemen Swedia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 431-441.
Omara, A. (2009). Efektivitas Pemberlakuan Electoral Quota dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 223-242.
Roring, E. B. (2024). IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG

- DASAR TAHUN 1945 (Perbandingan pada Masa Orde Baru dengan Pasca Reformasi). *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1).
- Afrida, Y. (2013). KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 3(2), 239-250.
- Mufrikhah, S. (2020). KETERBATASAN KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL INDONESIA: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 47-66.